

**IMPLEMENTASI KETENTUAN TENTANG SERAH TERIMA
PROTOKOL NOTARIS KEPADA NOTARIS PENGGANTI
DI KOTA PEKANBARU**

TESIS

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan*



Diajukan Oleh :

DEA ELING KURNIATI
NIM 2120122045

Dosen Pembimbing :

- 1. Prof. Dr. Elwi Danil, S.H., M.H**
- 2. Dr. Yasniwati, S.H., M.H**

**PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2024**

IMPLEMENTASI KETENTUAN TENTANG SERAH TERIMA PROTOKOL NOTARIS KEPADA NOTARIS PENGGANTI DI KOTA PEKANBARU

**Tesis, S2, Dea Eling Kurniati, 2120122045
Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Andalas**

ABSTRAK

Notaris Pengganti adalah seseorang yang untuk sementara diangkat sebagai Notaris untuk menggantikan Notaris yang sedang cuti, sakit, atau untuk sementara berhalangan menjalankan jabatannya sebagai Notaris. Setelah pengangkatan Notaris Pengganti yang dilantik oleh MPW, Notaris dan Notaris Pengganti wajib membuat berita acara serah terima protokol. Notaris yang menjalankan cuti wajib menyerahkan Protokol Notaris kepada Notaris Pengganti dan Protokol tersebut diserahkan kembali kepada Notaris setelah cuti berakhir. Pokok permasalahan adalah bagaimana implementasi Pasal 32 Undang-Undang Jabatan Notaris tentang Serah Terima Protokol Notaris Pengganti Kepada Notaris di Kota Pekanbaru dan bagaimana penerapan sanksi terhadap pelanggaran Pasal 32 Undang-Undang Jabatan Notaris tentang Serah Terima Protokol Notaris Kepada Notaris Pengganti di Kota Pekanbaru. Penelitian hukum ini menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu suatu penelitian yang menggunakan metode pendekatan terhadap masalah dengan melihat norma-norma hukum yang berlaku kemudian dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terdapat di lapangan. Dalam penelitian ini sumber data diperoleh dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen dan wawancara terstruktur. Hasil penelitian, Implementasi Pasal 32 UUJN tentang Serah Terima Protokol Notaris Pengganti Kepada Notaris di Kota Pekanbaru tidak sesuai dengan ketentuan yang seharusnya, karena kurangnya pengawasan oleh Majelis Pengawas. Kurangnya pengawasan terhadap Notaris mengakibatkan ketidak tahuan Notaris ataupun Notaris Pengganti dengan ketentuan Pasal 32 UUJN tersebut, dan faktor kebiasaan juga menyebabkan tidak dilaksanakannya berita acara serah terima Protokol Notaris yang telah diatur pada peraturan perundang-undangan. Sedangkan pengawasan mengenai Notaris diatur dalam Pasal 67 UUJN dan Pasal 68 UUJN juga mengatur mengenai beberapa bentuk Majelis Pengawas. Adapun tujuan dari pengawasan tersebut tidak hanya ditujukan bagi penataan Kode Etik Notaris akan tetapi juga untuk tujuan lainnya agar para Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh undang-undang demi pengamanan atas kepentingan masyarakat yang dilayani. Penerapan sanksi terhadap pelanggaran Pasal 32 UUJN tentang Serah Terima Protokol Notaris Kepada Notaris Pengganti di Kota Pekanbaru hanya memberikan sanksi administratif berupa teguran secara lisan sesuai dengan ketentuan Pasal 85 UUJN. Penjatuhan sanksi yang dilakukan oleh Majelis Pengawas terkait Pasal 32 UUJN berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 61 Tahun 2016 Pasal 5 huruf e. Sedangkan dalam hal kewajiban yang terdapat dalam Pasal 5 ayat (4) tidak dipenuhi dalam waktu yang ditetapkan atau melakukan kesalahan lain maka MPW dapat mengajukan usulan pemberhentian sementara kepada MPP berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1).

Kata Kunci : Implementasi, Serah Terima Protokol, Notaris Pengganti

IMPLEMENTATION OF PROVISIONS ON THE HANDOVER OF OFFICES OF SUBSTITUTE NOTARIES IN PEKANBARU CITY

**Thesis, S2, By Dea Eling Kurniati, 2120122045
Notary Master Program, Faculty of Law, Andalas University**

ABSTRACT

A Substitute Notary is someone who is temporarily appointed as a Notary to replace a Notary who is on leave, sick, or temporarily unable to carry out his/her duties as a Notary. After the appointment of a Substitute Notary who is inaugurated by the MPW, the Notary and the Substitute Notary are required to make a protocol handover report. The Notary who is on leave is required to submit the Notary Protocol to the Substitute Notary and the Protocol is returned to the Notary after the leave ends. The main problem is how to implement Article 32 of the Notary Law concerning the Handover of Substitute Notary Protocols to Notaries in Pekanbaru City and how to apply sanctions for violations of Article 32 of the Notary Law concerning the Handover of Notary Protocols to Substitute Notaries in Pekanbaru City. This legal research uses an empirical legal approach, namely a study that uses an approach method to problems by looking at applicable legal norms and then connecting them with legal facts in the field. In this study, data sources were obtained from library research and field research. Data collection techniques were carried out through document studies and structured interviews. The results of the study, the Implementation of Article 32 of the UUJN concerning the Handover of Substitute Notary Protocols to Notaries in Pekanbaru City is not in accordance with the provisions that should be, due to the lack of supervision by the Supervisory Board. The lack of supervision of Notaries results in the ignorance of Notaries or Substitute Notaries with the provisions of Article 32 of the UUJN, and the habit factor also causes the non-implementation of the minutes of the handover of Notary Protocols that have been regulated in the laws and regulations. Meanwhile, supervision of Notaries is regulated in Article 67 of the UUJN and Article 68 of the UUJN also regulates several forms of Supervisory Boards. The purpose of this supervision is not only intended for the arrangement of the Notary Code of Ethics but also for other purposes so that Notaries in carrying out their duties and positions meet the requirements set by law in order to safeguard the interests of the community being served. The application of sanctions for violations of Article 32 of the UUJN concerning the Handover of Notary Protocols to Substitute Notaries in Pekanbaru City only provides administrative sanctions in the form of verbal warnings in accordance with the provisions of Article 85 of the UUJN. The imposition of sanctions carried out by the Supervisory Board related to Article 32 UUJN is based on the provisions of the Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 61 of 2016 Article 5 letter e. Meanwhile, in the event that the obligations contained in Article 5 paragraph (4) are not fulfilled within the specified time or other errors are made, the MPW may submit a proposal for temporary dismissal to the MPP based on the provisions of Article 6 paragraph (1).

Keywords : Implementation, Handover of Position, Substitute Notary

